

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, (Jakarta:Prisma Media, 2004).

Amiek Soemarmi dan Sekar Anggun Gading Pinilih, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. (Semarang:UNDIP- Press, 2016).

A. Sudiharto dalam Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PT.Grasindo, 1992).

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Faljurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2019).

Hartini, S. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cetakan kedua, (Jakarta: BIP, 2008).

Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Buku I Edisi I (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018).

Ni'matul Huda dan Imam nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Saldi Isra, *Pemilu dan Pemilihan Daulat Rakyat*, (Jakarta: Themis Publishing, 2017).

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Wijaya, D. *BUMDESA: Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Medi, 2018).

Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017)

Jurnal:

Amir dan Hertanto, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024", *Journal Publicuho*, Volume 6, Nomor 2.

Budiono, "Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Voume 8, Nomor 2.

C. Bischoff et al. "Obeying Ministers or Laws? A Study of Danish Civil Servants' Responses to Illegal Requests. *"Scandinavian Journal of Public Administration* (2018). <https://doi.org/10.58235/sjpa.v22i3.11407>.

Firman, Meritrokasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengaruh Pilkada Langsung, *UUPA- The Indonesian Journal of Public Administration*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017.

Matias Neis Watunglawar, "Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Fairness and Justice, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2017.

Nugroho, Wahyu, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

Rike Anggun Artisa, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Review terhadap UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Volume. 06 Nomor.01 Tahun 2015.

Sri Hartini, Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Jurnal Dinamik Hukum*, Volume 9, Nomor 3 (2009) *Publisher*; bahan ini diambil dari Watunglawar, Matias Neis dalam Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Jember (2015)

Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam UU ASN", *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1 Tahun 2016.

Tedi Sudrajat dan Sri Hartini, "Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.

Internet:

Budiyanto, Arip. "*Penerapan Netralitas ASN di Lingkungan Kementerian Keuangan: Sebuah Upaya Konkret Menjaga Integritas dan Profesionalisme*," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

<https://bkpsdmburu.burukab.go.id/2023/12/05/surat-edaran-nomor-800-432-tahun-2023-tentang-netralitas-aparatur-sipil-negara-dalam-pelaksanaan-pemilihan-umum-dan-pemilihan-tahun-2024/>, diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 13.04 WIB

<http://dispenmaterikuliah.blogspot.co.id/2011/07/netralitas-pns-dalam-pilkada.html>, diakses di Semarang pada tanggal 08 November 2024 pukul 15.09 WIB

<https://kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemikdannekate#:~:text=06%20Feb%202024%20%2D%2004%3A42&text=Wakil%20Ketua%20Komisi%20Aparatur%20Sipil,di%20antaranya%20terbukti%20melanggar%20netralitas>, diakses pada tanggal 6 November 2024 pukul 19.32 WIB

<https://news.okezone.com/read/2018/09/20/606/1953370/kpu-tetapkan-7-968-caleg-dpr-ri-peserta-pemilu-2019>, diakses di Semarang pada tanggal 8 November 2024 pada pukul 15.05

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8176669/kelompok-kerja-pengawasan-bidang-penerapan-nilai-dasar-kode-etik-kode-perilaku-dan-netralitas-asn/pengaduan-netralitas-aparatur-sipil-negara>

<https://sulbar.kemenag.go.id/opini/asn-tak-netral-terancam-hukuman-disiplin-dan-pidana-pemilu-TVpAU>, diakses pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 12.28 WIB

<https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024/>, diakses pada tanggal 25 Maret pukul 13.00 WIB

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/bacaartikel/16805/Netralitas-ASN-terhadap-Pemilu-2024.html>, diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 13.13 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-lt61b739dbb5bf8/> diakses pada tanggal 6 November 2024 pukul 20.14 WIB.

<https://www.kasn.go.id/details/item/409-pantauan-netralitas-asn-oleh-kasn-dan-pattiro> diakses di Semarang pada 4 November 2024 Pukul 15.11 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Nomor 800/432 Tahun 2023 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara
dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan